

Gubernur Jabar Diancam Bunuh

Dari Halaman 1

selanjutnya terlebih dahulu.
"Kalau ada ancaman itu, ya risiko bagi seorang pemimpin. Kita lihat perkembangannya terlebih dahulu. Akan tetapi, apakah akun itu asli atau bukan, nanti kita lihat dan telusuri. Namun, sekarang saya akan lebih waspada," kata Dedi.
Dalam akun sosial media Instagram miliknya yang dipantau di Bandung, Selasa, Dedi mengaku ancaman pembunuhan bukan kali pertama. Bahkan, dia mengaku pernah mendapatkan ancaman pembunuhan setelah penutupan tambang ilegal di Kabupaten Subang.
Namun, Dedi Mulyadi merespons dengan tenang berbagai caci maki, hinaan, termasuk ancaman pembunuhan. Dia bahkan disebut pengkhianat dan penjahat dari demonstran yang meminta tambang ilegal kembali dibuka.
"Banyak orang bertanya, apakah saya akan me-

laporkan orang-orang yang telah menghina saya di depan umum. Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan yang pernah akan dilakukan terhadap diri saya," katanya.
Diketahui bahwa ancaman kepada Gubernur Jabar yang akrab disapa KDM itu disampaikan dalam komentar Live Chat di YouTube Kang Dedi Mulyadi, Senin (21/4) malam.
Dalam kolom komentar, akun "Wowo dan Dedi Mulyadi sesat!" berulang kali mengancam akan membunuh mantan Bupati Purwakarta tersebut hingga akan meledakkan rumah dan menculik anaknya.
"Saya udah muak hey Dedi Mulyadi. Tunggu saja tanggal mainnya, saya akan meledakkan tempat tinggal Anda dan saya akan menyuruh seseorang untuk menculik anak Anda," demikian isi posting tersebut.
Terdapat pula tulisan pada akun tersebut: "Woy Dedi Mulyadi, semoga lo tiba-tiba dari be-

lakang dihabis, ditusuk dengan pisau sama orang. WKWKWKW."
Bahkan, dia mengancam akan meledakkan diri di dekat Dedi Mulyadi menggunakan bom yang lebih parah dari peristiwa bom Bali.
"Kalau rencana saya gagal, saya akan pergi ke Jabar memakai bom lain yang saya punya itu bom bunuh diri. Saya akan berlari mencari Dedi dan jika sudah ketemu saya akan mendakukannya dan duar!!!," tulisan dalam akun tersebut.
Sang pengancam pun menyebut akan menjalakan aksinya kurang dari 2 bulan. "Tunggu nanti 2 bulan lagi saya akan melakukan aksi saya. Sekarang saya sedang merakit sebuah bom paku."
Selama 30 menit lebih penayangan Live Chat kanal YouTube Dedi Mulyadi, akun tersebut secara terus-menerus mengujarkan kebencian terhadap Dedi. Tidak hanya mengancam membunuh, akun itu juga menjadikan Jawa Barat seperti neraka. Bahkan, Cianjur menjadi sasarannya.(ant/j)

Grib Jaya Angkat Bicara..

Dari Halaman 1

Rismon Sianipar atas dugaan ijazah palsu Jokowi.
"Saya hadir di Medan didampingi Ketua DPD Grib Jaya Sumut, Samsul Tarigan untuk meluruskan dan meng-counter informasi yang menyudutkan salah satu Ormas dan seperti yang mengarah ke Grib Jaya," kata Razman Arif Nasution yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Komunikasi Publik Grib Jaya saat menggelar konferensi pers di hadapan puluhan wartawan.
Menurut Razman, ada dua pesan penting dari Ketum Grib Jaya yang harus disampaikannya dalam konferensi pers tersebut.
Pesan pertama, berkaitan dengan penangkapan salah satu kader Grib Jaya di Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
"Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi yang kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas," ujar Razman.
"Atas pesan bapak Ketum, meminta kepada Bapak Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar agar bekerja sesuai dengan Tupoksi selaku Pamong Praja," sambungnya.
Razman menambahkan, sebagai seorang Gubernur, beliau memiliki hak penuh menata dan mengelola pemerintahan di bidang eksekutif dan tidak boleh masuk ke ranah legislatif, apalagi yudikatif.
"Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grib, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pihak berwajib memprosesnya," tegasnya.
Lebih lanjut Razman menyampaikan, DPD Grib Jaya Jabar tidak mengintervensi masalah hukum tersebut. Mengingat, pihaknya tidak akan melindungi anggotanya yang melakukan tindakan kriminal sekecil apapun.
Selain itu, Razman juga menyampaikan pesan Hercules Rosalio de Marshal tentang pernyataan Rismon Sianipar, yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Jokowi.
"Supaya jangan mengulangnya lagi dan jangan menantang-nantang. Ini ada kaitannya dengan DPD Grib Jaya Sumut, karena dia berdomisili di Sumut," tuturnya.
Razman mengatakan, bila memang ada pelanggaran hukum terkait dugaan ijazah palsu tersebut, pihaknya mempersilakan untuk menempuh jalur hukum.
"Begitu juga ketika Pak Hercules berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Mereka berdua ini sudah bersahabat sejak lama. Kalau pun Pak Hercules memberikan dukungan moral, itu hal biasa," imbuhnya.
Lebih lanjut Razman mengungkapkan, jika memang Rismon mau mempersoalkan dugaan ijazah palsu itu, silakan mempertanyakannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tanya aja ke KPU. Mereka memverifikasi gak ijazah itu ketika Pak Jokowi menyalonkan diri sebagai Walikota Solo, Gubernur Jakarta dan Presiden RI," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Grib Jaya Sumut, Samsul Tarigan mengaku sangat mendukung pesan dari Ketum Grib Jaya yang disampaikan oleh Razman Arif Nasution tersebut.
"Bagaimana pun, semua Ormas yang ada harus kita hargai," ucapnya singkat. (ame/js)

MA Bongkar Jajaran Pimpinan-Hakim

Dari Halaman 1

tidak hanya melukai masyarakat Indonesia dan pemerhati hukum, tetapi juga menyakiti insan peradilan di bawah naungan MA.
Melalui rapat pimpinan yang digelar pada Selasa (22/4), MA mempromosikan hakim muda yang memiliki rekam jejak baik ke beberapa PN di wilayah Jakarta dan kota-kota besar lainnya.
Beberapa nama hakim muda yang dipromosikan menjadi hakim Jakarta yakni Ketua PN Dompur Ketut Darpan yang dipercaya menjadi Hakim PN Jakarta Selatan.
Hakim muda dan berintegritas lainnya yang dipromosikan menjadi hakim di Jakarta adalah Hakim Yustisial MA Sunoto- pernah berkiprah di Badan Pengawasan MA dan memimpin aksi kesejahteraan hakim pada 2012. Ia akan menjadi Hakim PN Jakarta Pusat.
Sedangkan srikandi yang dipromosikan menjadi hakim di wilayah Jakarta dan memiliki reputasi yang baik antara lain Hakim Yustisial MA Rosana Kesuma Hidayah yang sebelumnya pernah bertugas sebagai Hakim Yustisial di Badan Pengawasan MA dan aktif sebagai penulis buku serta karya ilmiah. Rosana akan mengisi jabatan sebagai Hakim PN Jakarta Pusat.
Sedangkan di kursi pimpinan pengadilan Jakarta dan beberapa kota besar lainnya akan diisi

orang baru ialah Ketua PN Jakarta Pusat yang akan dipimpin srikandi muda kelahiran 1974 yakni Husnul Khotimah, sebelumnya menjabat sebagai Ketua PN Balikpapan.
Ketua PN Jakarta Selatan akan dipimpin Agus Akhyudi yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PN Banjarmasin.
Sedangkan Ketua PN Jakarta Utara akan dijabat Yunto S Hamonangan Tampubolon yang sebelumnya bertugas sebagai Ketua PN Serang.
Di luar Jakarta, PN Semarang akan dipimpin oleh Ahmad Syafiq yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PN Pati. Ahmad Syafiq dikenal memiliki integritas dan berprestasi, dibuktikan dengan penghargaan insan Anti-Gratifikasi MA pada 2024 dan membawa satuan kerja yang dipimpinnya meraih berbagai penghargaan.
Lebih lanjut, terdapat tambahan 15 hakim yang akan bertugas di PN Jakarta Barat dan 11 lainnya dipindahkan ke pengadilan lainnya, sehingga total hakim di PN Jakarta Barat berjumlah 32 orang.
Sementara PN Jakarta Selatan akan memiliki hakim berjumlah 30 orang, di mana 14 hakim baru akan masuk dan 13 hakim serta satu Wakil Ketua Pengadilan pindah ke PN lainnya.
Adapun total hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berjumlah 37 orang. Terdiri dari 15 hakim baru akan masuk dan 13 hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua PN Jakarta

Pusat pindah ke PN lain.
PN Jakarta Timur akan memiliki 34 hakim. Sebanyak 18 hakim baru akan masuk dan 14 hakim pindah ke pengadilan lainnya.
PN Jakarta Utara akan mempunyai personel hakim sejumlah 31 orang, dengan 21 hakim baru dan 14 hakim akan pindah ke pengadilan lainnya, termasuk Ketua dan Wakil Ketua PN.
Sedangkan untuk PN di luar Jakarta, seperti Surabaya, MA melakukan perombakan total dengan menambahkan 14 hakim dan memutasikan 10 hakim ke pengadilan lainnya.
"Seluruh warga peradilan Indonesia meyakini langkah progresif dan cepat pimpinan Mahkamah Agung RI melakukan perubahan formasi pimpinan pengadilan dan hakim di Jakarta beserta kota besar lainnya tersebut akan membawa angin perubahan di lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI," tulis MA.
Ketua MA Sunarto berharap mutasi dan promosi ini akan membawa penyegaran dan memberi semangat kepada para hakim dan aparat peradilan untuk bekerja lebih baik lagi.
"Marilah kita hindari pelayanan-pelayanan yang akan diberikan oleh aparat pengadilan maupun aparat Mahkamah Agung pelayanan yang bersifat transaksional," katanya.
"Ke depan kita berdoa bersama-sama tidak ada lagi pelayanan yang bersifat transaksional," imbuhnya.(cnni/js)

Kejagung Temukan Rp5,5 Miliar

Dari Halaman 1

Harli menjelaskan uang itu ditemukan penyidik di bawah tempat tidur setelah mendapatkan informasi terkait lokasi penyimpanan uang dari Ali Muhtarom.
"Jadi ketika saudara AM diperiksa di sini, berkomunikasi dengan keluarga di sana akhirnya itu ditunjukkan dibuka diambil bahwa uang itu ada di bawah tempat tidur," ujarnya.
Kendati demikian, Harli mengatakan saat ini penyidik tengah mendalami asal usul uang yang

ditemukan itu. Apakah murni hasil suap yang diterimanya atau bukan.
"Itu juga yang mau didalami. Apakah itu aliran itu yang belum digunakan atau memang itu simpanan dari yang lain, kita belum tahu," katanya.
Sebelumnya Kejagung menetapkan total delapan orang tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait vonis lepas di perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit periode 2021-2022.
Kedelapan tersangka itu Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta, pengacara Marcella Santoso dan Ariyanto, Panitera Muda PN Jakut Wahyu Gunawan.

Kemudian ketiga Majelis Hakim pemberi vonis lepas yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom. Serta Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafei.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut uang suap sebesar Rp60 miliar tersebut berasal dari tim legal dari PT Wilmar Group.
Ia mengatakan uang suap itu diberikan setelah adanya pesan dari PN Jakpus agar perkara tersebut harus segera diurus karena Majelis Hakim bisa memberikan hukuman maksimal melebihi tuntutan Jaksa.(cnni/js)

Jokowi Akan Tempuh Jalur Hukum

Dari Halaman 1

wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).
Yakub menerangkan, bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum.
"Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ, namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan," jelasnya.

Namun sampai saat ini tim kuasa hukum belum memberi informasi soal siapa saja keempat orang tersebut. Kata Yakub, mereka menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum ini.
"Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," ungkapnya.
Yakub memastikan persiapan berkas untuk pelaporan keempat orang itu sudah mencapai 95 persen. Mereka bahkan sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini.
"Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau

kita kuasa hukum persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95 persen kalau ditanya jumlahnya," jelasnya.
Lalu, Yakub menyebut jalur hukum yang akan ditempuh dalam waktu dekat ini adalah hukum pidana, sehingga pelaporan akan dilakukan ke kepolisian.
"Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," tegasnya.(bes/js)

KPK Segera Umumkan.....

Dari Halaman 1

tersangka yang ditetapkan saat itu. Namun, dalam perjalanannya, KPK menemukan bukti mengenai dugaan keterlibatan anggota DPR RI di Komisi XI.
Terbaru, tepatnya pada Senin (21/4), penyidik KPK memeriksa Anggota DPR RI Fraksi NasDem Satori untuk mendalami penggunaan dana CSR BI. Itu merupakan kali ketiga Satori diperiksa sebagai saksi.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan belum ada perubahan status hukum dari Satori. Hanya saja, dalam waktu dekat KPK akan mengumumkan ke publik nama-nama tersangka yang harus diminta pertanggungjawabannya hukumnya.

"Belum [berubah status hukum Satori], sedang [proses]. Nanti sebentar lagi, sebentar lagi," kata Asep dikutip Rabu (23/4).
Jenderal bintang satu ini menuturkan seorang saksi bisa diperiksa berkali-kali tergantung kebutuhan tim penyidik. Teruntuk Satori, terang Asep, penyidik membutuhkan keterangan mendalam karena yang bersangkutan merupakan salah satu pihak penerima dan pengguna dana CSR BI.
"Jadi, beliau kan salah satu yang penerima dan pengguna. Sebetulnya penerimaannya itu adalah Yayasan, tapi Yayasan itu diajukan oleh yang bersangkutan. Jadi, yang bersangkutan itu dipanggil ke sini, kita konfirmasi lagi terkait dengan penggunaan dari dana CSR," ungkap Asep.

Selain Satori, ada nama Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan yang rumah kediamannya telah digeledah.
Asep menjelaskan Heri Gunawan mempunyai peran yang sama dengan Satori. Keduanya mempunyai yayasan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing politisi tersebut.
Ke depan, penyidik bakal menjadwalkan pemeriksaan Heri.
"Nanti kita akan memanggil bapak HG untuk CSR yang digunakan oleh pak HG," kata Asep.
Kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia diungkap KPK pertama kali pada September lalu. Saat itu KPK menyebut penggunaan dana CSR BI diduga bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan. Dana CSR BI diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. (cnni/js)

Indonesia Kecam Keras Serangan di Kashmir

Dari Halaman 1

pelakunya.
"Kami menyampaikan belasungkawa dan simpati sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, dan kami mendoakan agar semua yang terluka segera pulih," demikian keterangan Kemlu RI. Sebelumnya, 26 orang tewas dalam serangan

oleh kelompok bersenjata di Kashmir, India.
Seorang pemandu wisata bernama Waheed di Pahalgam mengatakan ia tiba di lokasi kejadian usai mendengar suara tembakan.
Salah satu saksi mata menyampaikan kepada kantor berita Press Trust of India bahwa orang-orang bersenjata tak dikenal menembaki turis dari jarak dekat. Mayoritas korban tewas diyakini pelancong.

Peristiwa ini terjadi di wilayah Himalaya, yang kerap dilanda ketegangan. Sebagian wilayah Himalaya dikelola oleh India dan sebagian lagi oleh Pakistan.
Kelompok milisi lokal telah memerangi pasukan keamanan India selama dua dekade terakhir untuk menuntut kemerdekaan agar daerah itu menjadi bagian dari Pakistan.(cnni/js)

Malaysia Tarik Makanan Impor dari RI

Dari Halaman 1

dan mendesak importir untuk menghubungi agensi untuk mengatur penghapusannya dari pasar.
Penarikan produk ini dilakukan Malaysia menindaklanjuti pengumuman Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia dan Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang menemukan sembilan dari 11 produk makanan ringan yang diselidiki ternyata mengandung unsur babi.
Padahal sebagian besar dari sembilan produk makanan yang mengandung unsur babi itu telah mengantongi sertifikasi halal.

Malaysia pun meminta importir yang terkait segera melapor kepada Jakim dan menarik produk tersebut dari peredaran di Malaysia.
Langkah ini, menurut Jakim, bertujuan melindungi konsumen Muslim serta memastikan hanya produk yang benar-benar halal yang diperjualbelikan.(cnni/js)



Hidayah Apa Benar Ekspor Beras?

negara lain. Ini bisa dimaknai sebagai keberhasilan dalam produksi pertanian. Namun, simbolisme politik tidak boleh menutupi kenyataan di lapangan.
Masih segar dalam ingatan, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Indonesia beberapa kali mengimpor beras dalam jumlah besar. Pemerintah beralih, impor dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan menambah cadangan. Jika dalam waktu yang relatif singkat kita beralih dari impor ke ekspor, maka masyarakat berhak bertanya: seberapa akurat data produksi dan stok pangan nasional kita?
Kebijakan ekspor beras seharusnya tidak hanya berdasarkan asumsi surplus produksi. Ia harus dibarengi dengan kepastian bahwa harga beras di pasar domestik tetap terjangkau, distribusi lancar, dan petani memperoleh harga jual yang adil. Tanpa itu semua, ekspor justru bisa menjadi bumerang—membuka peluang kelangkaan dan spekulasi harga di dalam negeri.
Perhatian juga perlu diarahkan pada aspek keadilan bagi petani. Sudah terlalu lama mereka berada di posisi yang paling rentan dalam rantai produksi pangan. Jika ekspor beras hanya menguntungkan segelintir eksportir besar dan pengusaha, sementara petani tetap bergelut dengan biaya produksi tinggi dan harga jual rendah, maka kebijakan ini kehilangan makna sosialnya.
Restu Prabowo atas ekspor beras juga bisa dibaca sebagai manuver politik awal. Ia ingin menunjukkan bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan, mampu berikar dan menjadi pemain penting dalam rantai pasok pangan dunia. Namun politik pangan bukan hanya soal ekspor. Ia menyangkut hak rakyat untuk mendapatkan pangan yang terjangkau, sehat, dan berkelanjutan.
Kedaulatan pangan sejati tidak diukur dari volume ekspor, melainkan dari seberapa besar negara mampu menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh warganya, tanpa harus bergantung pada mekanisme pasar global yang rentan fluktuasi. Kita boleh bangga mengekspor beras, tetapi jangan lupa bahwa keberhasilan bangsa juga diukur dari apakah rakyat kecil bisa makan dengan layak setiap hari.
Sebelum beras dikirim ke luar negeri, pastikan dulu piring rakyat tidak kosong.
Lebih dari sekadar ekspor, kebijakan pangan harus menjadi cermin arah pembangunan nasional. Negara tidak boleh hanya bertindak sebagai fasilitator perdagangan, tetapi harus hadir sebagai pengatur yang melindungi kepentingan petani dan konsumen. Dalam konteks ini, restu terhadap ekspor beras perlu dibarengi dengan transparansi data produksi, cadangan strategis, dan proyeksi kebutuhan domestik dalam jangka pendek maupun panjang.
Penting juga untuk melihat ekspor beras dalam lanskap global. Di tengah ketidakpastian iklim dan geopolitik, banyak negara mulai membatasi ekspor pangan demi menjaga ketahanan nasional. India, salah satu eksportir beras terbesar dunia, bahkan sempat menghentikan ekspor jenis beras tertentu demi menjaga stabilitas harga dalam negeri. Maka, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: apakah Indonesia siap mengambil risiko geopolitik pangan, sementara di dalam negeri sendiri harga beras masih fluktuatif?
Kebijakan pangan seharusnya berangkat dari prinsip keberlanjutan dan keadilan. Jika ekspor dilakukan hanya demi mengejar devisa tanpa disertai perlindungan terhadap produsen dan konsumen dalam negeri, maka itu bukanlah prestasi, melainkan ilusi. Pemerintah ke depan harus memastikan bahwa setiap butir beras yang diekspor telah melewati hitung-hitungan yang matang bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari sisi keadilan sosial.